E-ISSN: 3025-0994
Halaman 7740-7753
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan BUMN di Indonesia

Elsa Seri Widyawati[1], Bambang Ahmad Indarto[2]

[1,2] Universitas Ngudi Waluyo
e-mail: elsaseriw@gmail.com [1], bambangahmadindarto@unw.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen terhadap tax avoidance pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2025 dengan total 50 observasi data panel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel yang diolah menggunakan perangkat lunak EViews 10, dengan model estimasi yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik, struktur kepemilikan pemerintah, dan kebijakan dividen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada perusahaan BUMN, keberadaan koneksi politik, dominasi kepemilikan pemerintah, serta kebijakan pembagian dividen yang tinggi dapat meningkatkan pengawasan dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, praktik *tax avoidance* cenderung menurun seiring dengan meningkatnya faktor-faktor tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memahami determinan perilaku perpajakan perusahaan BUMN di Indonesia.

Kata Kunci: Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan Pemerintah, Struktur Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, *Tax Avoidance*

Abstract

This study aims to analyze the effect of political connections, ownership structure, and dividend policy on tax avoidance in non-financial State-Owned Enterprises (SOEs) listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2025 period, with a total of 50 panel data observations. This research employs a quantitative approach using panel data regression analysis processed with EViews 10, applying the Common Effect Model (CEM) as the estimation method. The results indicate that political connections, government ownership structure, and dividend policy have a significant negative effect on tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership shows a negative but not significant effect on tax avoidance. These findings suggest that in SOEs, the presence of political connections, higher government ownership, and greater dividend distribution tend to enhance monitoring and encourage

corporate compliance with tax regulations, thereby reducing the likelihood of tax avoidance practices. This study provides empirical evidence that contributes to a better understanding of the determinants of corporate tax behavior in Indonesian SOEs.

Keywords: *Political Connections, Government Ownership Structure, Institutional Ownership Structure, Dividend Policy, Tax Avoidance*

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta penyediaan layanan publik di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun atau meningkat sebesar 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.716,77 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Bahkan, realisasi tersebut melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 108,8%. Pada APBN 2024, kontribusi pajak terhadap total pendapatan negara mencapai Rp2.309,9 triliun atau sebesar 82,43% (Kementerian Keuangan, 2024). Data tersebut menegaskan bahwa pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang sangat vital.

Di sisi lain, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak, khususnya perusahaan. Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan, sementara perusahaan cenderung berusaha meminimalkan beban pajak untuk mempertahankan atau meningkatkan laba. Upaya meminimalkan beban pajak tersebut sering dilakukan melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu strategi yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku (Hijriani et al., 2014). Kondisi ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara otoritas fiskal dan pelaku usaha.

Fenomena *tax avoidance* menjadi isu penting karena berpotensi mengurangi penerimaan negara secara signifikan. Secara konseptual, *tax avoidance* berbeda dengan tax evasion. Tax avoidance dilakukan melalui cara-cara yang sah dengan memanfaatkan kelemahan regulasi, sedangkan tax evasion merupakan tindakan ilegal yang melanggar hukum, seperti manipulasi laporan keuangan atau penyembunyian penghasilan. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk melakukan *tax avoidance*, antara lain transfer pricing, pemanfaatan insentif pajak secara agresif, *capital intensity*, serta penundaan pengakuan penghasilan. Strategi tersebut memungkinkan perusahaan menekan beban pajak tanpa melanggar aturan secara formal.

Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal, baik dalam bentuk insentif maupun penguatan kepatuhan. Kebijakan insentif seperti *tax holiday* dan *tax allowance* bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tax holiday memberikan fasilitas pengurangan atau pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 100% dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020

(Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Sementara itu, tax allowance memberikan pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 30% dari nilai investasi serta berbagai fasilitas lainnya sebagaimana diatur dalam PP No. 78 Tahun 2019. Di sisi lain, kebijakan tax amnesty berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 memberikan penghapusan kewajiban pajak masa lalu dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis data perpajakan (Diningrum et al., 2023).

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, praktik penghindaran pajak masih menjadi tantangan serius. Laporan *Tax Justice Network* (2023) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian pajak sebesar 2.736,5 juta dolar AS atau sekitar Rp44 triliun akibat praktik penghindaran pajak korporasi, serta tambahan sekitar Rp1 triliun akibat pelarian aset ke luar negeri (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan regulasi perpajakan masih perlu diperkuat.

Dalam konteks perusahaan di Indonesia, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), fenomena tax avoidance menjadi menarik untuk dikaji. BUMN memiliki karakteristik unik karena berfungsi sebagai agen pembangunan sekaligus entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Data Kementerian BUMN menunjukkan bahwa jumlah BUMN pada tahun 2023 sebanyak 65 perusahaan, dengan total aset mencapai Rp10.402 triliun dan laba bersih sebesar Rp327 triliun (Kantor Berita Indonesia, 2024). Selain itu, kontribusi BUMN terhadap negara dalam bentuk pajak, dividen, dan PNBP mencapai Rp636 triliun pada tahun 2023 (Antara News, 2023).

Namun demikian, terdapat paradoks dalam praktik perpajakan BUMN. Di satu sisi, BUMN sebagai entitas milik negara seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan pajak. Di sisi lain, tekanan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan memenuhi target dividen dapat mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi pajak, termasuk melalui praktik *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya indikasi penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Asturbewa & Oktavia, 2023).

Berbagai faktor diduga memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan BUMN, di antaranya koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen. Koneksi politik dapat memberikan keuntungan tertentu bagi perusahaan, seperti kemudahan akses terhadap sumber daya dan rendahnya risiko pemeriksaan pajak (Ishak & Asalam, 2023). Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam. Hijriani et al. (2014) menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Manihuruk dan Novita (2023) menunjukkan adanya pengaruh signifikan.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada penggunaan data terbaru perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025, sehingga mampu merepresentasikan kondisi terkini pasca reformasi kebijakan perpajakan dan transformasi BUMN. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan tiga variabel utama, yaitu koneksi politik, struktur kepemilikan (pemerintah dan institusional), serta kebijakan dividen dalam satu model analisis, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada BUMN.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen terhadap tax avoidance pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2021–2025. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur di bidang perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji secara empiris pengaruh koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen terhadap tax avoidance. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini mengukur variabel dalam bentuk angka dan menganalisisnya menggunakan metode statistik (Sugiyono, 2013). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal, yaitu untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antar variabel. Objek penelitian adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2021–2025. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan (*annual report)* yang dipublikasikan melalui situs resmi BEI dan masing-masing perusahaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI selama periode penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu, antara lain perusahaan yang terdaftar secara konsisten, memiliki laporan keuangan yang lengkap dan telah diaudit, menyajikan data variabel penelitian secara lengkap, tidak mengalami delisting, serta tidak termasuk dalam sektor keuangan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 10 perusahaan sebagai sampel dengan total 50 observasi selama lima tahun pengamatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax avoidance yang diukur menggunakan Cash *Effective Tax Rate* (*Cash ETR*) (Dyreng et al., 2006). Variabel independen meliputi koneksi politik yang diukur dengan variabel dummy (Faccio, 2006), struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan pemerintah dan kepemilikan institusional (Manihuruk & Novita, 2023; Salihu, 2014), serta kebijakan dividen yang diukur menggunakan *Dividend Payout Ratio* (DPR) (Sartono, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengkaji laporan keuangan dan *annual report* perusahaan. Analisis data menggunakan regresi data panel yang merupakan kombinasi data time series dan cross section dengan bantuan perangkat lunak EViews 10. Model regresi yang digunakan dipilih melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model, Fixed Effect Model, atau Random Effect Model (Ghozali, 2017). Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas model. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t) guna mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tax avoidance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan menganalisis perilaku tax avoidance

yang dipengaruhi oleh koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan *annual report* periode 2021–2025 yang diperoleh dari situs resmi BEI dan masing-masing perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu, termasuk tidak berasal dari sektor keuangan karena memiliki karakteristik laporan yang berbeda. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 10 perusahaan sebagai sampel penelitian, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Aneka Tambang Tbk., PT Elnusa Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Timah Tbk., dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, dan rata-rata (mean) dari setiap variabel.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Sebelum Outlier

Date: 07/22/26 Time: 10:37
Sample: 2021 2025

	LOGY	X1	X2	X3	X4
Mean	-1.013460	0.936170	0.609162	0.824323	0.498288
Median	-1.273403	1.000000	0.650000	0.836557	0.480000
Maximum	2.408375	1.000000	0.839560	0.989128	1.181449
Minimum	-3.549946	0.000000	0.510000	0.510222	0.000000
Std. Dev.	1.232502	0.247092	0.086965	0.140108	0.366780
Skewness	0.940241	-3.568592	0.195286	-0.833008	0.154667
Kurtosis	3.861486	13.73485	2.095736	2.876631	1.894264
Jarque-Bera	8.378480	325.4287	1.900053	5.465376	2.581748
Probability	0.015158	0.000000	0.386731	0.065044	0.275030
Sum	-47.63263	44.00000	28.63061	38.74316	23.41953
Sum Sq. Dev.	69.87681	2.808511	0.347895	0.902997	6.188258
Observations	47	47	47	47	47

Sumber: Eviews 10 (data diolah peneliti, 2026)

Berdasarkan Tabel 1, variabel *tax avoidance* yang diukur menggunakan Cash ETR memiliki nilai minimum sebesar -3,54 (PT Elnusa, 2023) dan maksimum sebesar 2,40 (PT Pembangunan Perumahan, 2023), dengan rata-rata sebesar -1,01. Variabel koneksi politik menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,93 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan sampel memiliki koneksi politik. Struktur kepemilikan pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 0,609 dengan rentang antara 0,510 hingga 0,839, sedangkan kepemilikan institusional memiliki rata-rata sebesar 0,824. Sementara itu, kebijakan dividen (DPR) memiliki rata-rata sebesar 0,498 dengan nilai minimum 0,000 dan maksimum 1,181.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Setelah Outlier

Date: 07/22/26 Time: 10:15
Sample: 2021 2025

	LOGY	X1	X2	X3	X4
Mean	-1.053190	0.933333	0.616199	0.813305	0.481255
Median	-1.347074	1.000000	0.650000	0.833424	0.466667
Maximum	2.358020	1.000000	0.839560	0.985160	1.181449
Minimum	-3.218876	0.000000	0.510000	0.510222	0.000000
Std. Dev.	1.132154	0.252262	0.085304	0.139155	0.375303
Skewness	1.026441	-3.474396	0.060353	-0.723922	0.212131
Kurtosis	4.114676	13.07143	2.202898	2.757324	1.872867
Jarque-Bera	10.23155	280.7239	1.218639	4.040889	2.719552
Probability	0.006001	0.000000	0.543721	0.132596	0.256718
Sum	-47.39353	42.00000	27.72895	36.59871	21.65649
Sum Sq. Dev.	56.39799	2.800000	0.320177	0.852019	6.197491
Observations	45	45	45	45	45

Sumber: Eviews 10 (data diolah peneliti, 2026)

Setelah dilakukan penghapusan outlier sebanyak 4 data, jumlah observasi menjadi 45. Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata tax avoidance sebesar -1,053 dengan nilai minimum -3,218 dan maksimum 2,358. Variabel koneksi politik tetap menunjukkan dominasi nilai dummy 1 dengan rata-rata 0,93. Struktur kepemilikan pemerintah memiliki rata-rata sebesar 0,616, sedangkan kepemilikan institusional sebesar 0,813. Adapun nilai rata-rata kebijakan dividen (DPR) sebesar 0,481. Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi data menjadi lebih stabil setelah penghapusan outlier.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar statistik sehingga hasil estimasi yang diperoleh bersifat valid, tidak bias, dan reliabel.

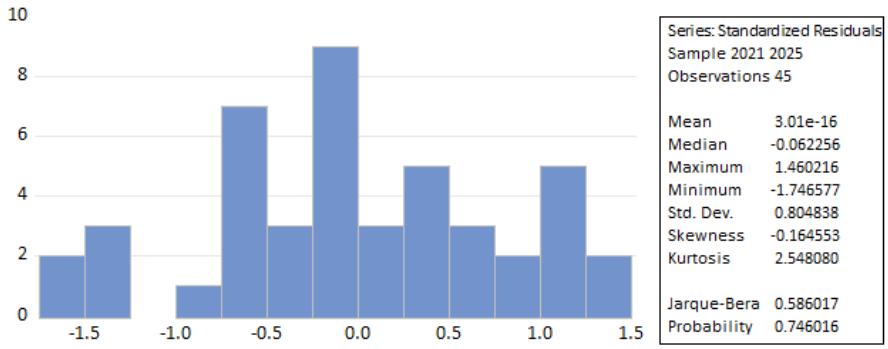

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Eviews 10 (data diolah peneliti, 2026)

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,746 (>0,05), sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini mengindikasikan bahwa residual model telah memenuhi asumsi normalitas yang menjadi syarat dalam analisis regresi. Dengan terpenuhinya asumsi ini, model regresi dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut tanpa adanya bias distribusi.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABSRES
Method: Panel Least Squares
Date: 07/21/26 Time: 00:38
Sample: 2021 2025
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (unbalanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.665108	0.605357	2.750623	0.0089
X1	0.190289	0.276485	0.688244	0.4953
X2	-0.349060	0.856105	-0.407731	0.6856
X3	-1.140318	0.571824	-1.994178	0.0530
X4	-0.126898	0.203374	-0.623962	0.5362

Sumber: Eviews 10 (data diolah peneliti, 2026)

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Hal ini berarti varians residual bersifat konstan pada setiap pengamatan. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 07/21/26 Time: 01:18
Sample: 1 46
Included observations: 45

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.240212	78.32465	NA
X1	0.258711	15.24948	1.016632
X2	2.480431	60.59463	1.114570
X3	1.106617	47.55138	1.323235
X4	0.139979	3.264972	1.217502

Sumber: Eviews 10 (data diolah peneliti, 2026)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel independen dalam model. Dengan demikian, model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas dan estimasi parameter dapat diinterpretasikan dengan baik.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi (LM Test)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.137906	Prob. F(2,38)	0.8716
Obs*R-squared	0.324265	Prob. Chi-Square(2)	0.8503

Sumber: Eviews 10 (data diolah peneliti, 2026)

Hasil uji autokorelasi menggunakan LM Test menunjukkan nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar 0,8503 (>0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi serial pada residual model regresi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi independensi residual dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel dilakukan untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Proses ini dilakukan melalui tiga tahapan pengujian, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM), sehingga diperoleh model yang paling efisien dan tidak bias.

Tabel 6. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.130966	(9,31)	0.3715
Cross-section Chi-square	12.777018	9	0.1730

Sumber: Eviews 10 (data diolah peneliti, 2026)

Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,1730 (>0,05), sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM) dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan antar individu (perusahaan) dalam data penelitian. Dengan demikian, model CEM dinilai cukup representatif dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

Tabel 7. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.322835	4	0.2557

Sumber: Eviews 10 (data diolah peneliti, 2026)

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,2557 (>0,05), sehingga *Random Effect Model* (REM) lebih tepat dibandingkan *Fixed Effect Mode*l (FEM). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara efek individual dengan variabel independen

dalam model. Dengan demikian, pendekatan REM dapat digunakan sebagai alternatif dalam estimasi model.

Tabel 8. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.274277 (0.6005)	2.407119 (0.1208)	2.681396 (0.1015)
Honda	-0.523715 (0.6998)	-1.551489 (0.9396)	-1.467391 (0.9289)
King-Wu	-0.523715 (0.6998)	-1.551489 (0.9396)	-1.581287 (0.9431)
Standardized Honda	0.265340 (0.3954)	-1.389011 (0.9176)	-4.374906 (1.0000)
Standardized King-Wu	0.265340 (0.3954)	-1.389011 (0.9176)	-4.306281 (1.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

Sumber: Eviews 10 (data diolah peneliti, 2026)

Hasil uji Lagrange Multiplier menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,10 (>0,05), sehingga model yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM) dibandingkan *Random Effect Model* (REM). Hal ini mengindikasikan bahwa varians antar individu tidak cukup signifikan untuk menggunakan model efek acak. Oleh karena itu, model CEM dinilai lebih sederhana dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Pemilihan Model

Metode Pemilihan Model	Model Terpilih
Uji Chow	CEM
Uji Hausman	REM
Uji Lagrange Multiplier	CEM

Sumber: Eviews 10 (data diolah peneliti, 2026)

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian, model yang paling konsisten dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Model ini kemudian digunakan dalam tahap analisis selanjutnya, termasuk uji hipotesis dan pengujian kelayakan model.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model CEM untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap *tax avoidance*.

Tabel 10. Hasil *Common Effect Model*

Dependent Variable: LOGY
Method: Panel Least Squares
Date: 07/21/26 Time: 01:27
Sample: 2021 2025
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (unbalanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.480223	1.113648	4.023015	0.0002
X1	-1.206000	0.508637	-2.371044	0.0226
X2	-3.672409	1.574938	-2.331780	0.0248
X3	-2.040149	1.051959	-1.939381	0.0595
X4	-1.009061	0.374138	-2.697027	0.0102

R-squared	0.494634	Mean dependent var	-1.053190
Adjusted R-squared	0.444097	S.D. dependent var	1.132154
S.E. of regression	0.844122	Akaike info criterion	2.603399
Sum squared resid	28.50165	Schwarz criterion	2.804139
Log likelihood	-53.57647	Hannan-Quinn criter.	2.678233
F-statistic	9.787620	Durbin-Watson stat	1.232297
Prob(F-statistic)	0.000013		

Sumber: Eviews 10 (data diolah peneliti, 2026)

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* (koefisien -1,206000; p-value 0,0226). Struktur kepemilikan pemerintah juga berpengaruh negatif signifikan (koefisien -3,672409; p-value 0,0248). Sementara itu, kepemilikan institusional berpengaruh negatif namun tidak signifikan (koefisien -2,040149; p-value 0,595). Kebijakan dividen berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance (koefisien -1,009061; p-value 0,0102).

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000013 (<0,05), yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,4946 menunjukkan bahwa sebesar 49,46% variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen, sedangkan sisanya sebesar 50,54% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian**.**

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik, struktur kepemilikan pemerintah, struktur kepemilikan institusional, dan kebijakan dividen memiliki peran yang berbeda dalam memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan BUMN. Secara parsial, variabel koneksi politik terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance dengan nilai koefisien sebesar -1,206000 dan tingkat signifikansi 0,0226 (<0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan teori kekuasaan politik (*political power theory*) dan perspektif *rent-seeking*

dalam teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), di mana perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah cenderung memperoleh berbagai kemudahan, termasuk dalam pengawasan perpajakan. Koneksi politik memungkinkan perusahaan memiliki akses informasi yang lebih baik serta kemampuan negosiasi yang lebih kuat terhadap otoritas pajak, sehingga menurunkan risiko terdeteksi dan sanksi. Kondisi ini mendorong manajemen untuk lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak karena adanya perlindungan politik (*political shield*). Hasil ini konsisten dengan penelitian Syamsuddin, Sultan, dan Sahrir (2021) serta Nurrahmi dan Rahayu (2020) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, struktur kepemilikan pemerintah juga terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance dengan koefisien sebesar -3,672409 dan nilai signifikansi 0,0248 (<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh pemerintah, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Temuan ini secara sekilas bertentangan dengan asumsi *political cost hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan milik negara seharusnya lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Namun demikian, fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif masalah keagenan pada BUMN, di mana pengawasan pemerintah sebagai pemilik cenderung kurang efektif dibandingkan pemilik swasta yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan. Selain itu, BUMN memiliki tujuan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga tujuan sosial dan politik, sehingga membuka peluang bagi manajemen untuk memanfaatkan celah dalam pengawasan, termasuk dalam praktik perencanaan pajak agresif. Ditambah lagi, BUMN secara inheren memiliki koneksi politik yang kuat, sehingga memberikan keleluasaan lebih besar dalam berinteraksi dengan otoritas pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Arviyanti dan Muiz (2018) yang menemukan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan BUMN.

Pada variabel struktur kepemilikan institusional, hasil penelitian menunjukkan koefisien negatif sebesar -2,040149 dengan tingkat signifikansi 0,0595 (>0,05), yang berarti berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan institusional cenderung diikuti oleh peningkatan praktik penghindaran pajak, meskipun pengaruhnya relatif lemah. Secara teoritis, keberadaan investor institusional diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen sesuai dengan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Namun, dalam praktiknya, tidak semua investor institusional berorientasi jangka panjang. Sebagian investor institusional yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek justru mendorong manajemen untuk meningkatkan laba melalui strategi efisiensi, termasuk penghindaran pajak. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional lebih berperan sebagai tekanan kinerja (*performance pressure*) dibandingkan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Krisna (2019) yang menemukan adanya hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*, serta didukung oleh temuan Lokahita et al. (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, kebijakan dividen juga terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance dengan koefisien sebesar -1,009061 dan nilai signifikansi 0,0102 (<0,05). Hasil ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi Dividend Payout Ratio (DPR), maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif kebutuhan arus kas (*cash flow needs perspective)* yang berkaitan dengan teori sinyal (*signaling theory*). Perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah besar memiliki komitmen untuk menyediakan kas secara konsisten kepada pemegang saham sebagai sinyal kinerja yang baik (Bhattacharya et al., 1979). Untuk memenuhi komitmen tersebut, manajemen cenderung melakukan efisiensi pada beban pajak guna menjaga likuiditas dan ketersediaan dana internal. Dengan demikian, penghindaran pajak menjadi salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mempertahankan stabilitas pembayaran dividen. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi (2021) yang menunjukkan adanya keterkaitan antara kebijakan dividen, kepemilikan, dan *tax avoidance* dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan.

Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa koneksi politik, struktur kepemilikan pemerintah, struktur kepemilikan institusional, dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas sebesar 0,000013 (<0,05). Secara keseluruhan, keempat variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan arah hubungan yang konsisten, yaitu meningkatkan kecenderungan praktik penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan koneksi politik yang kuat, kepemilikan pemerintah yang dominan, kepemilikan institusional yang tinggi, serta kebijakan dividen yang besar memiliki insentif dan ruang yang lebih luas untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif. Dengan demikian, praktik *tax avoidance* pada BUMN tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor politik dan tata kelola perusahaan yang kompleks.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik, struktur kepemilikan pemerintah, dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin kuat koneksi politik, semakin besar kepemilikan pemerintah, serta semakin tinggi rasio pembayaran dividen, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, meskipun menunjukkan bahwa fungsi pengawasan investor institusional belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik tersebut. Secara simultan, seluruh variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan kemampuan model menjelaskan sebesar 49,46%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa faktor relasi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan distribusi laba merupakan determinan penting dalam mendorong praktik *tax avoidance* pada perusahaan BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

Antara News. (2023). Antra News. Https://Www.Antaranews.Com/Berita/4201374/Bri-Jadi-Kontributor-Dividen-Bumn-Terbesar-Pada-2023

Arviyanti, A., &Amp; Muiz, E. (2018). Pengaruh Karakeristik Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak/Tax Avoidance Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Pada Bei Tahun 2013-2016. *Jurnal Akuntansi, 7*(1), 28-46. Https://Doi.Org/10.37932/Ja.V7i1.22

Asturbewa, H. S., &Amp; Oktavia, R. (2023). Indikasi Perusahaan BUMN Melakukan Penghindaran Pajak. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 1*(2), 263-279. Https://Doi.Org/10.55606/Jumia.V1i2.1296

Bhattacharya, S. (1979). Imperfect Information, Dividend Policy, And “The Bird In The Hand” Fallacy. *Bell Journal Of Economics, 10*(1), 259-70. Https://Doi.Org/10.2307/3003330

Dewi, E. G. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening. J*ournal Of Business And Economics (JBE) UPI YPTK, 6*(1), 33–39. Https://Doi.Org/10.35134/Jbeupiyptk.V6i1.103

Diningrum, N., &Amp; Kurniawati, E. (2024). Political Connection And Tax Avoidance: Evidence From Two-Tier Board System In Indonesia. *JRAK, 16*(2), 327-336. Https://Doi.Org/10.23969/Jrak.V16i2.17362

Dyreng, S. D., Hanlon, M., &Amp; Maydew, E. L. (2008). Long‐Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review, 83*(1), 61-82. Https://Doi.Org/10.2308/Accr.2008.83.1.61

Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. *American Economic Review, 96*(1), 369-386. Https://Doi.Org/10.1257/000282806776157704

Ghozali, I., &Amp; Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat Dan Ekonometrika (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hijriani, A. N., Latifah, S. W., & Setyawan, S. (2014). Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi, 4*(1), 525–534. Https://Doi.Org/10.22219/Jrak.V4i1.4924

Ishak, A. C., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 7*(4), 2041–3051. Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V7i4.1720

Jensen, M. C., &Amp; Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics, 3*(4), 305-360. Https://Doi.Org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pada Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi), 18*(2), 82-91. Https://Doi.Org/10.22225/We.18.2.1162.82-91

Lokahita, G. A., &Amp; Saputri, S. W. (2024). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. AKUA: *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 3*(4), 217-229. Https://Doi.Org/10.54259/Akua.V3i4.3031

Manihuruk, B. P., &Amp; Novita, S. (2023). Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik Dan Kepemilikan Institusional. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 7*(1), 391-400. Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V7i1.1285

Nurrahmi, A. D., &Amp; Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. J*AE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi), 5*(2), 48-57. Https://Doi.Org/10.29407/Jae.V5i2.14162

Sartono, A. (2010). Manajemen Keuangan: Teori Dan Aplikasi.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Sahrir, S., Syamsuddin, S., &Amp; Sultan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 5*(1), 14-30. Https://Doi.Org/10.33059/Jensi.V5i1.3517